

PENGARUH BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PERIODE TAHUN 2023

Khairaningrum Mulyanti¹, Sitti Hosnul Khotimah²

Program Studi S1 Terapan Akuntansi Keuangan, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

khairaningrum@ulbi.ac.id, khotim311@gmail.com

ABSTRACT

Expenditures in public sector agencies need to be carried out effectively to minimize the potential for fraud. In order to increase budget absorption, public sector agencies need to allocate an adequate budget ceiling. Purposive sampling was used as a sampling technique and 86 DJKN work units were obtained that met the criteria in 2023. A two-tailed test was used as a hypothesis test and the data was analyzed using descriptive statistical analysis, normality test, multiple correlation analysis, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, t test, and f test. The t test results show that goods expenditure or capital expenditure has a significant effect on budget absorption. The results of the f test show that goods expenditure and capital expenditure have a significant effect on budget absorption with a coefficient of determination value of 63.40%.

Keywords: Goods Expenditures, Capital Expenditures, Budget Absorption

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945, pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan di berbagai bidang. Terbentuknya pemerintahan menciptakan konsekuensi berupa pengelolaan keuangan negara yang terstruktur. Adanya APBN menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam mengelola hak dan kewajiban negara. Meskipun Pemerintah telah merencanakan dengan baik sumber penerimaan pembiayaan, namun pada akhir periode sangat dimungkinkan terdapat sisa anggaran. Sisa anggaran yang tinggi mengindikasikan pemborosan karena terdapat dana yang menganggur atau tidak teralokasikan terhadap program atau kegiatan yang telah ditetapkan.

Dilansir dari berita Kontan.co.id terkait penyerapan anggaran tahun 2023 “Presiden Joko Widodo meminta pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L). Presiden Joko Widodo berharap penyerapan anggaran dapat menyerap setidaknya 95% dalam APBN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada akhir Oktober 2023 tingkat penyerapan anggaran masih sebesar 73,2% dari anggaran. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengimbau kepada seluruh K/L dalam mempersiapkan realisasi anggaran pada awal tahun mendatang. Hal ini untuk memastikan proses penyerapan anggaran tidak melambat”. Rendahnya penyerapan anggaran menjadi permasalahan sebagian besar satuan kerja DJKN. Data penyerapan anggaran instansi tersebut yaitu:

Tabel 1. Penyerapan Anggaran Satuan Kerja DJKN Periode Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1	KPKNL Pekanbaru	2.653.020.000	2.345.612.573	88,41
2	KPKNL Palembang	5.517.812.000	4.774.694.241	86,53
3	KPKNL Jakarta IV	2.135.186.000	1.822.192.875	85,34
4	KPKNL Purwakarta	3.066.404.000	2.654.137.787	86,56
5	KPKNL Yogyakarta	2.074.260.000	1.668.919.896	80,46
6	Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur	4.205.596.000	3.776.327.076	89,79
7	KPKNL Surabaya	2.962.050.000	2.621.401.305	88,50
8	KPKNL Sidoarjo	2.844.803.000	2.308.720.001	81,16
9	KPKNL Madiun	1.893.655.000	1.695.637.602	89,54
10	KPKNL Pontianak	2.349.406.000	2.105.757.131	89,63
11	KPKNL Singkawang	1.687.439.000	1.507.738.470	89,35
12	KPKNL Tarakan	2.007.707.000	1.688.986.366	84,13
13	Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	3.439.724.000	2.959.393.375	86,04
14	KPKNL Mataram	2.041.387.000	1.836.487.450	89,96
15	KPKNL Biak	1.806.290.000	1.611.175.724	89,20

Sumber: Data Diolah

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PMK Nomor 258 Tahun 2015 “Penyerapan anggaran tergolong rendah apabila instansi memiliki penyerapan anggaran kurang dari 90%”. Penyerapan anggaran rendah artinya terdapat anggaran instansi yang belum terealisasi sehingga kegiatan yang didukung dengan anggaran tersebut belum terealisasi. Satuan kerja DJKN yang tidak dapat menyerap anggaran belanja secara efektif menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah disajikan, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh belanja barang terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja DJKN periode tahun 2023?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja DJKN periode tahun 2023?
3. Bagaimana pengaruh belanja barang dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja DJKN periode tahun 2023?

STUDI LITERATUR

Belanja Barang



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Belanja barang adalah pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian barang atau jasa yang habis pakai dan dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat”. Pengukuran belanja barang dilakukan untuk memastikan apakah penggunaan belanja barang telah sesuai dengan yang telah direncanakan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Belanja barang dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Barang} = \frac{\text{Realisasi Belanja Barang}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Sumber: (Fitra, 2019)

Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran yang berkaitan untuk memperoleh aset yang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun”. Pengukuran belanja modal dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran terkait aset tetap. Sehingga dengan pengukuran belanja modal, sumber daya pada instansi dapat dialokasikan secara optimal. Rumus yang digunakan untuk menghitung belanja modal yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Sumber: (Fitra, 2019)

Penyerapan Anggaran

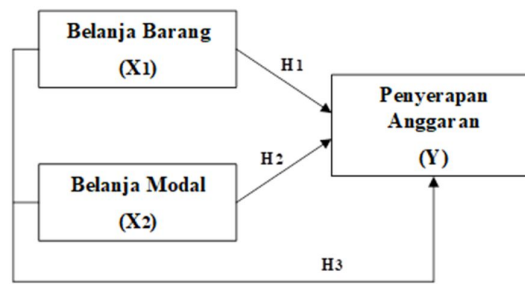
Penyerapan anggaran dilakukan untuk memastikan apakah anggaran telah digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan melakukan pengukuran, analisis, dan evaluasi secara berkala, diharapkan penyerapan anggaran dapat dioptimalkan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perhitungan penyerapan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Sumber: (Santosa, 2021)

Kerangka Berpikir

“Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai elemen yang diidentifikasi sebagai fokus dalam penelitian” (Sugiyono, 2023). Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Penelitian Terdahulu

“Penelitian terdahulu dapat menjadi landasan bagi peneliti dalam memahami permasalahan pada objek yang akan diteliti” (Amruddin et al., 2022). Penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini yaitu:

1. Hasil Penelitian (Kumenaung et al., 2019)

Hasil penelitian terkait “Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas SAM Ratulangi” menunjukkan bahwa belanja barang dan belanja modal mempengaruhi penyerapan anggaran.

2. Hasil Penelitian (Cahyaningtyas, 2023)

Penelitian terkait “Pengaruh Proporsi Belanja Barang dan Jasa, Revisi Anggaran, dan Lokasi Satuan Kerja Terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran” menunjukkan bahwa proporsi belanja barang dan jasa mempengaruhi penyerapan anggaran.

3. Hasil Penelitian (Dyna et al., 2023)

Penelitian terkait “Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan” oleh (Dyna et al., 2023) menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa serta belanja modal mempengaruhi penyerapan anggaran.

METODE

Jenis Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian. “Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan dalam bentuk angka yang dimulai dari pengumpulan data hingga interpretasi data yang digunakan sampai pada tahap penyajian hasil data dalam penelitian” (Veronica et al., 2022).

Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian” (Veronica et al., 2022). Data pada penelitian ini berasal dari situs resmi djkn.kemenkeu.go.id berupa Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja satuan kerja DJKN tahun anggaran 2023.

Populasi dan Sampel

Satuan kerja DJKN menjadi populasi pada penelitian yaitu sebanyak 88 instansi. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik sampling dengan kriteria satuan kerja DJKN yang mempublikasikan Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja tahun anggaran 2023. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, diperoleh instansi yang memenuhi kriteria sebanyak 86 satuan kerja DJKN dalam periode 1 tahun.

Teknik Analisis Data

“Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dalam penelitian dengan cara memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian” (Priadana & Sunarsi, 2021). Data pada penelitian diolah menggunakan program *SPSS Version 25* dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, analisis korelasi berganda, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji f.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. *Output* Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Barang	86	27.21	93.45	74.9286	15.75313
Belanja Modal	86	.00	67.41	16.0795	16.23907
Penyerapan Anggaran	86	80.46	99.65	91.3424	3.45706
Valid N (listwise)	86				

Sumber: *SPSS Version 25*

Berdasarkan data di atas diketahui sampel penelitian sebanyak 86. Belanja barang memiliki nilai *minimum* 27,21 dan *maximum* 93,45. Sedangkan nilai *mean* belanja barang sebesar 74,9286 dengan standar deviasi 15,75313. Belanja modal memiliki nilai *minimum* 0,00 dan *maximum* 67,41. Sedangkan nilai *mean* belanja modal sebesar 16,0795 dengan standar deviasi 16,23907. Penyerapan anggaran memiliki nilai *minimum* 80,46 dan *maximum* 99,65. Sedangkan nilai *mean* penyerapan anggaran sebesar 91,3424 dengan standar deviasi 3,45706.

Uji Normalitas

Tabel 3. *Output* Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.57023175
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.108
	Negative	-.072
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.015 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.251
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *SPSS Version 25*

Data di atas merupakan hasil pengolahan setelah dilakukan transformasi arcsin dan diketahui nilai *Exact Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,251. Maka data terdistribusi secara normal.

Analisis Korelasi Berganda

Tabel 4. *Output* Analisis Korelasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.634	.625	2.11784

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Belanja Barang
b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: SPSS Version 25

Analisis data menunjukkan bahwa *pearson correlation* yaitu sebesar 0,796 maka terdapat hubungan yang kuat antara belanja barang dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. *Output* Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	42.486	4.258		9.978	.000
	Belanja Barang	.534	.047	2.434	11.293	.000
	Belanja Modal	.549	.046	2.581	11.974	.000

Sumber: SPSS Version 25

Berdasarkan analisis data didapat persamaan model yang menjelaskan hubungan antara penyerapan anggaran dengan belanja barang dan belanja modal yaitu:

$$Y = 42,486 + 0,534 X_1 + 0,549 X_2$$

1. Nilai konstanta (a) yaitu sebesar 42,486, sehingga apabila belanja barang dan belanja modal nilainya adalah 0, maka nilai penyerapan anggaran sebesar 42,486.
2. Koefisien regresi belanja barang yaitu sebesar 0,534, sehingga apabila belanja barang mengalami kenaikan 1 satuan, maka penyerapan anggaran akan terjadi kenaikan sebesar 0,534.
3. Koefisien regresi belanja modal yaitu sebesar 0,549, sehingga apabila belanja modal mengalami kenaikan 1 satuan, maka penyerapan anggaran akan terjadi kenaikan sebesar 0,549.

Koefisien Determinasi

Tabel 6. *Output* Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.634	.625	2.11784

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Belanja Barang
b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: SPSS Version 25

Berdasarkan data di atas untuk mengetahui nilai persentase variabel pada penelitian menggunakan perhitungan yaitu:

$$KD = 0,634 \times 100\% = 63,40\%$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 63,40% belanja barang dan belanja modal mempengaruhi penyerapan anggaran serta sebesar 36,60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Uji T

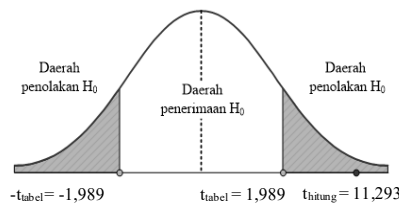
Tabel 7. *Output Uji T*

		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	42.486	4.258		9.978	.000
	Belanja Barang	.534	.047	2.434	11.293	.000
	Belanja Modal	.549	.046	2.581	11.974	.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

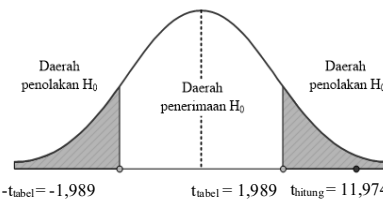
Sumber: SPSS Version 25

Berdasarkan data di atas diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $11,293 > 1,989$. Sehingga H_a diterima atau belanja barang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berikut merupakan daerah penolakan H_0 dan penerimaan H_a dalam bentuk kurva:



Gambar 2. Kurva Distribusi X_1 Terhadap Y

Berdasarkan data di atas diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $11,947 > 1,989$. Sehingga H_a diterima atau belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berikut merupakan daerah penolakan H_0 dan penerimaan H_a dalam bentuk kurva



Gambar 3. Kurva Distribusi X_2 Terhadap Y

Uji F

Tabel 8. *Output Uji F*

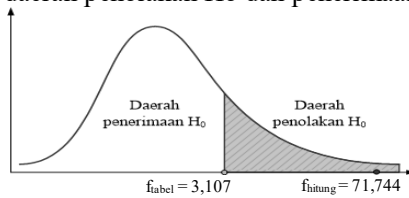
		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	643.582	2	321.791	71.744	.000 ^b
	Residual	372.277	83	4.485		
	Total	1015.859	85			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Belanja Barang

Sumber: SPSS Version 25

Berdasarkan data di atas diketahui nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $71,744 > 3,107$. Sehingga H_a diterima atau belanja barang dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berikut merupakan daerah penolakan H_0 dan penerimaan H_a dalam bentuk kurva:



Gambar 4. Kurva Distribusi X_1 dan X_2 Terhadap Y

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Barang Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $11,293 > 1,989$. Sehingga H_a diterima atau belanja barang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. “Rasio belanja barang menunjukkan cara pemerintah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin yaitu belanja barang secara optimal. Semakin tinggi persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin maka persentase belanja modal cenderung semakin kecil” (Fitra, 2019). Seperti halnya pada KPKNL Kendari pada tahun 2023 persentase belanja barang sebesar 93,45 namun persentase belanja modal hanya sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Kendari mengutamakan alokasi dananya pada belanja barang. Belanja barang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Apabila belanja barang terealisasi dengan baik, maka program dan kegiatan instansi berjalan sesuai rencana. Hal ini berimplikasi pada peningkatan penyerapan anggaran secara keseluruhan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $11,974 > 1,989$. Sehingga H_a diterima atau belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. “Rasio belanja modal menggambarkan cara pemerintah dalam memprioritaskan alokasi anggaran pada belanja pembangunan atau belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan maka persentase belanja modal yang digunakan untuk sarana dan prasarana cenderung semakin besar” (Fitra, 2019). Seperti halnya pada KPKNL Manado pada tahun 2023 persentase belanja modal sebesar 67,41 namun persentase belanja barang hanya sebesar 27,21. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Manado mengutamakan alokasi dananya pada belanja modal. Belanja modal memungkinkan instansi memiliki peralatan atau infrastruktur yang memadai, sehingga satuan kerja DJKN dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran, pemerintah perlu mengalokasikan pagu anggaran terkait belanja modal yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pengaruh Belanja Barang dan Belanja Modal Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $71,744 > 3,107$. Sehingga H_a diterima atau belanja barang dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Realisasi anggaran yang tinggi dapat mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan anggaran secara optimal dan efisien. Belanja barang memiliki proses realisasi yang lebih cepat karena sifatnya yang lebih rutin. Dibandingkan dengan belanja barang, realisasi belanja modal cenderung lebih lambat sebab proses perencanaan dan pelaksanaannya lebih kompleks. Oleh

sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola belanja barang dan belanja modal secara optimal agar dapat mencapai target penyerapan anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Belanja barang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja DJKN periode tahun 2023.
2. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja DJKN periode tahun 2023.
3. Belanja barang dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja DJKN periode tahun 2023.

REFERENSI

- Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka.
- Cahyaningtyas, A. (2023). *Pengaruh Proporsi Belanja Barang dan Jasa, Revisi Anggaran, dan Lokasi Satuan Kerja Terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran*.
- Dyna, D. R., Masnila, N., & Wahyudi, R. (2023). *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV IRDH.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.
- Kumenaung, A. G., Engka, D. S. M., & Ratag, W. A. (2019). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas SAM Ratulangi*.
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Santosa, A. B. (2021). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. UAD PRESS.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Veronica, A., Ernawati, Rasdiana, Abas, M., Yusriani, Hadawiah, Hidayah, N., Sabtohadhi, J., Marlina, H., Mulyani, W., & Zulkarnaini. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.